

K O N S E P
SISTEM MANAJEMEN MUSEUM
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

TAHUN
2015

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan YME, dengan karuniaNya laporan akhir konsep sistem manajemen museum dapat diselesaikan dengan baik.

Tim swakelola berusaha membuat konsep sistem manajemen museum yang sesuai dan mencerminkan Kementerian Pekerjaan Umum. Dalam prosesnya, data-data penunjang didapatkan berdasarkan hasil survey dan masukan dari narasumber profesional dibidangnya. Serta beberapa literatur terkait permuseuman.

Tema konsep sistem manajemen museum yang diusung yaitu modern dan terkini, dengan tidak meninggalkan sisi sejarah dibaliknya .

Melalui laporan akhir ini, adanya masukan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan demi kemajuan dan kelangsungan museum pekerjaan umum di masa mendatang.

Demikian Laporan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tim Swakelola :

Dr. Yuke Ardhiati

Ir. Utuy R Sulaiman, M.T

Eko Cahyantoro, SE., M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB 1	KERANGKA KEGIATAN	4
1.1.	Bentuk, Jenis, dan Lingkup Kegiatan	4
1.2.	Maksud, Tujuan, dan Sasaran Kegiatan	5
1.3.	Masukan–Keluaran dan Proses Kerja	6
BAB 2	GAGASAN PENDIRIAN MUSEUM PU	8
2.1.	Latar dan Ide Dasar	9
2.2.	Dasar Hukum	9
2.3.	Visi dan Misi Museum PU	9
2.4.	Maksud dan Tujuan Pendirian Museum PU	10
2.5.	Arti Penting Museum PU	10
BAB 3	TINJAUAN UMUM tentang MUSEUM	12
3.1.	Pengertian Museum	12
3.2.	Sejarah Perkembangan Museum	13
3.3.	Misi dan Fungsi Museum	14
3.4.	Peran Museum dalam Masyarakat	17
3.5.	Bentuk dan Jenis Museum	20
3.6.	Kondisi Permuseuman di Indonesia	21
BAB 4	TINJAUAN UMUM tentang PEKERJAAN UMUM	24
4.1.	Pengertian Pekerjaan Umum	24
4.2.	Pekerjaan Umum dalam Sejarah-Budaya Indonesia	25
4.3.	Sejarah Kementerian Pekerjaan Umum	28
4.4.	Visi, Misi, dan Organisasi Kementerian Pekerjaan Umum	31
4.5.	Karya-karya Utama, Tokoh, dan Peristiwa	33

BAB	5	RENCANA PENDIRIAN MUSEUM PU	40
	5.1.	Nama dan Makna	40
	5.2.	Program Kerja	43
	5.3.	Kerangka Dasar Museum PU	45
	5.3.1.	Lokasi	45
	5.3.2.	Konsep Arsitektur dan Program Ruang	46
	5.3.3.	Materi dan Koleksi	51
	5.3.4.	Periodisasi Pengisahan	52
	5.3.5.	Rencana Umum Tata Pamer	52
	5.3.6.	Rancangan Program Pendukung	53
	5.4.	Sistem Manajemen Museum PU	53
	5.4.1.	Rencana Organisasi dan Uraian Tugas	54
	5.3.2.	Strategi Pendanaan	56
	5.3.3.	Strategi Pelaksanaan	57
	5.3.4.	Kerangka dan Tahapan Kerja	58
BAB	6	PENUTUP	61
	6.1.	Kesimpulan	61
	6.2.	Rekomendasi	62

LAMPIRAN

- A. SK TIM PELAKSANA KEGIATAN
- B. RISALAH RAPAT
- C. FOTO - FOTO SURVEY MUSEUM



BAB I

KERANGKA KEGIATAN

1.1. Bentuk, Jenis, dan Lingkup Kegiatan

Kegiatan/pekerjaan Sistem Manajemen Museum Kementerian Pekerjaan Umum dilaksanakan dalam kerangka rencana pendirian Museum Pekerjaan Umum. Bentuk kegiatan secara umum berupa pekerjaan penyusunan konsep.

Pekerjaan ini diselenggarakan secara swakelola oleh Biro Umum, Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, dengan dibantu oleh beberapa narasumber sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan. Jenis atau kategori pekerjaan adalah pengadaan jasa perencanaan non-kontraktual.

Lingkup pelaksanaan pekerjaan Sistem Manajemen Museum Pekerjaan Umum ini mencakup:

- a.** Kajian
- b.** Pembahasan
- c.** Penyusunan konsep

Cakupan utama pekerjaan adalah pengertian dan batasan tentang sistem manajemen museum. Proses pelaksanaan kerja berupa olah-pikir (berbasis *brainware*) yang diarahkan untuk memperoleh hasil akhir berupa konsep sistem manajemen museum.

1.2. Maksud, Tujuan, dan Sasaran Kegiatan

Pekerjaan penyusunan konsep tentang sistem manajemen museum ini dimaksudkan sebagai perwujudan (implementasi) dari gagasan pendirian Museum Pekerjaan Umum. Dengan demikian pekerjaan ini sekaligus juga merupakan langkah lanjutan dari rangkaian proses kegiatan pendirian Museum Pekerjaan Umum, yang telah mulai diolah dan dilaksanakan sejak tahun 2013 lalu.

Tujuan umum pelaksanaan kegiatan adalah perolehan konsep tentang sistem manajemen museum untuk Museum Pekerjaan Umum.

Pencapaian tujuan umum didukung oleh pencapaian tujuan khusus, yaitu:

1. Perolehan pengertian dan batasan tentang sistem permuseuman
2. Perolehan batasan yang disepakati tentang Pekerjaan Umum dalam kerangka pendirian Museum Pekerjaan Umum

Pencapaian tujuan-tujuan tersebut diupayakan melalui perolehan beberapa sasaran pekerjaan berikut.

- a. Konsep, pengertian dan batasan tentang museum
- b. Misi, fungsi, dan peran museum
- c. Bentuk dan jenis museum
- d. Perkembangan dan kondisi permuseuman
- e. Pengertian dan cakupan Pekerjaan Umum
- f. Sejarah budaya Pekerjaan Umum dan sejarah Kementerian PU
- g. Uraian dan gambaran tentang Kementerian Pekerjaan Umum
- h. Produk-produk penting dan tokoh-tokoh Pekerjaan Umum
- i. Makna, Visi, dan Misi Museum PU
- j. Lokasi dan ruang untuk Museum PU
- k. Materi, muatan dan rencana koleksi Museum PU
- l. Rencana pengisahan dan tata pameran Museum PU
- m. Rencana dan konsep sistem manajemen Museum PU
- n. Strategi, tahapan, dan kerangka kerja

Hasil kegiatan akan berupa produk olah pikir (*brainware*) tentang konsep untuk sistem manajemen Museum Pekerjaan Umum. Produk kegiatan berupa laporan, dengan produk akhir dari keseluruhan rangkaian kegiatan adalah Laporan Akhir ini.

1.3. Masukan–Keluaran dan Proses Kerja

Kerangka pikir dalam pekerjaan penyusunan konsep sistem manajemen Museum Pekerjaan Umum ditempatkan dalam kerangka relasional antara masukan (*input*) kegiatan dan keluaran (*output*) kegiatan. Relasi di antara keduanya berupa proses kerja.

Masukan (*input*) kegiatan berupa:

- a.** Gagasan pendirian Museum Pekerjaan Umum
- b.** KAK Sistem Manajemen Museum Kementerian Pekerjaan Umum

Keluaran (*output*) kegiatan berupa:

- a.** Konsep Sistem Manajemen Museum Kementerian Pekerjaan Umum
- b.** Strategi kerja dan langkah kerja lanjutan

Relasi Masukan–Keluaran dalam kerangka prosesual dilaksanakan dengan proses pelaksanaan kerja, yang mengacu kepada lingkup pekerjaan terdiri dari proses-proses Kajian, Pembahasan, dan Penyusunan Konsep.

PROSES KAJIAN

Rencana pelaksanaan kajian mencakup beberapa topik utama, antaranya:

- a.** Museum dan Permuseuman
- b.** Sejarah Kementerian Pekerjaan Umum

serta dilengkapi dengan beberapa topik pendukung, antaranya:

- c.** Rencana ruang dan lokasi Museum PU
- d.** Rencana koleksi dan muatan Museum PU
- e.** Rencana pengisahan Museum PU

Metodologi dan teknik pelaksanaan kajian secara umum berupa:

- Kompilasi dan seleksi data kepustakaan
- Observasi ruang dan kawasan
- Kajian koleksi dan muatan sementara
- Kajian sistem manajemen permuseuman
- Pembahasan hasil kajian.

PROSES PEMBAHASAN

Pembahasan hasil kajian dilaksanakan dengan melibatkan:

- Narasumber internal dari Kementerian Pekerjaan Umum,
- Narasumber eksternal, kalangan permuseuman, utamanya dengan Paramita Jaya, yaitu organisasi profesi Asosiasi Museum Indonesia wilayah DKI Jakarta.

Dilaksanakan dalam kurun waktu April hingga Oktober 2014 sebanyak 8 kali pertemuan. Rincian teknis pelaksanaan serta risalah hasil rapat dan pembahasan terdapat pada Lampiran Laporan Akhir ini.

Rapat dan pembahasan tersebut dilaksanakan dalam kerangka:

- a. Pelaksanan kajian
- b. Penyusunan konsep

PROSES PENYUSUNAN KONSEP

Penyusunan konsep tentang Museum PU dilaksanakan dalam kerangka pembahasan tentang:

- a. Museum dan Permuseuman
- b. Sejarah dan Uraian tentang Pekerjaan Umum

yang melalui proses inferensi akan menghasilkan:

- c. Konsep Museum Pu,

yang dalam tahapan proses kerja saat ini difokuskan pada:

- d. Rencana dan Sistem Manejemen Museum PU.



BAB II

GAGASAN PENDIRIAN MUSEUM PU

2.1. Latar dan Ide Dasar

Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), perlu adanya bukti otentik tentang proses perkembangan itu sendiri. Sejarah iptek adalah bagian dari sejarah-budaya kehidupan manusia. Sejarah pembangunan dalam suatu negara, salah satunya.

Kementerian Pekerjaan Umum sebagai salah satu instansi pembangun Indonesia, ingin memberikan rekam jejak proses perjalanan Teknologi Jalan, Jembatan, Bendungan, Bangunan dan lain-lain, dengan mendirikan sebuah museum. Karena museum diyakini merupakan media efektif untuk menyajikan proses rekam jejak pembangunan, yang hasilnya dapat lebih mudah dimengerti oleh masyarakat.

Pengembangan gagasan ini juga didukung oleh kebutuhan optimalisasi pemanfaatan ruang-ruang di lingkungan Kementerian PU, sehingga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan bangunan negara; serta meningkatkan efektivitasnya, dengan pemanfaatan sebagai area layanan publik. Sebagai penyelenggara negara di bidang pengelolaan bangunan negara, selayaknya Kementerian PU menjadi teladan dalam pemanfaatan bangunan negara.

2.2. Dasar Hukum

- a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 45/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara dalam pasal pasal 3 (ayat 1) butir a;
- b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Pasal 66, ditegaskan tugas Bagian Prasarana Fisik adalah pelaksanaan urusan utilitas, bangunan gedung dan rumah jabatan, sarana dan prasarana lingkungan.

2.3. Visi dan Misi Museum PU

Visi dan Misi Museum PU disusun dengan mengacu kepada Visi dan Misi museum secara umum, maupun Visi dan Misi Kementerian Pekerjaan Umum.

Visi Museum PU:

Terwujudnya Museum Pekerjaan Umum sebagai wadah untuk menggali, melestarikan, dan mengembangkan budaya dan teknologi sebagai warisan budaya bangsa; serta menjadi pusat riset dan informasi sebagai wadah pengembangan apresiasi publik terhadap proses kerja dan hasil kerja di bidang Pekerjaan Umum.

MISI Museum PU:

1. Melaksanakan penyelamatan, pengumpulan, dan pengawetan bukti-bukti sejarah-budaya kegiatan Pekerjaan Umum di Indonesia;
2. Melaksanakan pendokumentasian dan kajian ilmiah yang berhubungan dengan sejarah Pekerjaan Umum di Indonesia;
3. Mewujudkan peran museum sebagai sarana informasi, publikasi, edukasi dan rekreasi (*edutainment*);
4. Membangun jaringan kerja dan meningkatkan koordinasi serta kerjasama dalam bidang permuseuman, serta jaringan kerja, koordinasi, dan

kerjasama untuk pelestarian bangunan bersejarah yang berkaitan dengan Pekerjaan Umum;

5. Membangun dan mengembangkan kompetensi SDM Museum PU;
6. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian bangunan bersejarah yang berkaitan dengan Pekerjaan Umum.

2.4. Maksud dan Tujuan Pendirian Museum PU

Pendirian Museum PU dimaksudkan sebagai perwujudan peran serta Kementerian Pekerjaan Umum dalam pembentukan karakter bangsa dan penguatan identitas bangsa, khususnya terkait warisan sejarah-budaya di bidang infrastruktur dan pembangunan negara.

Tujuan Pendirian Museum PU adalah:

- a. Pelestarian warisan sejarah-budaya dalam bentuk pengumpulan dan pendokumentasian berbagai bukti sejarah-budaya bidang Pekerjaan Umum di Indonesia, termasuk berbagai dokumen Kementerian PU,
- b. Pelestarian warisan sejarah-budaya dalam bentuk penyelamatan, pemeliharaan, dan pemanfaatan bukti-bukti sejarah-budaya bidang Pekerjaan Umum di Indonesia, khususnya berbagai karya agung (*master piece*) di bidang infrastruktur karya anak bangsa,
- c. Pelestarian warisan sejarah-budaya dengan pelaksanaan kajian ilmiah di bidang sejarah-budaya infrastruktur Indonesia,
- d. Pengembangan dan penyebar-luasan informasi tentang Pekerjaan Umum di Indonesia kepada masyarakat luas,
- e. Penguatan dan peningkatan penghargaan masyarakat terhadap bidang Pekerjaan Umum, untuk meningkatkan kebanggaan terhadap karya bangsa Indonesia dan membangkitkan rasa cinta tanah air.

2.5. Arti Penting Museum PU

Museum PU juga dapat berperan dalam membangun opini masyarakat tentang Pekerjaan Umum. Sampai saat ini masih ada sebagian masyarakat yang secara umum berpendapat bahwa produk-produk konstruksi publik yang

dihasilkan oleh pemerintah kolonial Belanda, memiliki kualitas yang lebih baik dari produk konstruksi publik karya bangsa Indonesia. Museum PU perlu menjadi sumber informasi yang lebih berimbang dan sekaligus membangun rasa bangga terhadap karya bangsa, khususnya di bidang Pekerjaan Umum.

Di sisi lain, untuk kepentingan masa kini dan masa depan, Museum PU juga diharapkan dapat berperan penting sumber inspirasi di bidang infrastruktur publik. Melalui Museum PU ini, diharapkan masyarakat dapat memperoleh pembelajaran dan inspirasi, untuk mengembangkan inovasi dan kreasi dalam penciptaan dan pembangunan infrastruktur publik.



BAB III

TINJAUAN UMUM tentang MUSEUM

3.1. Pengertian Museum

Museum, secara etimologis berasal dari kata *Muse*, yaitu 9 Dewi Kesenian dan Ilmu-pengetahuan dalam pantheon Yunani. Museum (jamaknya Musea) pada mulanya dimaknai sebagai gedung tempat penyimpanan barang-barang seni dan ilmiah; namun kini museum dimaknai sebagai sebuah lembaga, bukan sekadar bangunan.

Batasan dan pengertian tentang museum sebagaimana tercantum dalam statuta ICOM (*International Council of Museums*) adalah:

A museum is a non-profit, permanent institution in the service of society and its development, open to the public, which acquires, conserves, researches, communicates and exhibits the tangible and intangible heritage of humanity and its environment for the purpose of education, study and enjoyment.

Menurut Undang-undang Cagar Budaya, pengertiannya adalah:

Museum merupakan lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi berupa benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya atau yang bukan Cagar Budaya, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.

Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah ketentuan tentang lembaga permanen sebagai penyelenggara museum. Contoh kasus misalnya, Museum Adam Malik, di Jakarta, belum berbentuk lembaga permanen, tidak jelas pertanggung-jawaban koleksinya, akhirnya dicabut status museumnya; atau Museum Batik, di Pekalongan: kerjasama Yayasan Kadin dengan Pemkot Pekalongan, melibatkan komunitas batik di Pekalongan, tidak jelas status kelembagaannya, sehingga rancu pengelolaan koleksinya.

3.2. Sejarah Perkembangan Museum

Pada awal keberadaannya, museum merupakan ruang tempat penyimpanan barang-barang unik dan berharga, atau yang bernilai sejarah, milik para bangsawan Eropa. Benda koleksi umumnya diperoleh dari berbagai ekspedisi ke berbagai penjuru dunia, diperoleh dari pertukaran atau pembelian, maupun penjarahan.

Dalam perkembangannya, sebagian museum kemudian berstatus milik publik, biasanya lembaga ilmu-pengetahuan, bukan lagi milik pribadi. Namun proses perolehan koleksinya sering-kali masih lewat pemaksaan, seiring praktek kolonialisme Eropa di dunia.

Ketika aspek ilmu-pengetahuan semakin menguat, museum tak lagi terfokus pada koleksi aneh dan unik, meluas ke berbagai bentuk warisan sejarah-budaya, atau warisan alam. Peran publik semakin menguat pula, dan aspek komunikasi publik mulai muncul, setara dengan aspek pelestarian koleksi

Dalam perkembangan terkini, didorong konsep *New Museology*, aspek publik semakin menonjol, sementara sisi pelestarian semakin melemah. Jargon-jargon *marketing* bergaung di museum, dan sisi-sisi komersial mulai menguat.

Sebagian kalangan di ICOM mulai mengkhawatirkan perkembangan museum ke arah komersial ini. Banyak pengamat dan pekerja museum maupun budayawan berpendapat, bahwa museum saat ini mungkin satu-satunya lembaga sosial

yang masih bertahan di dunia, setelah dunia kesehatan dan dunia pendidikan semakin hari semakin bersifat komersial. Tambahan lagi, banyak museum memiliki keterbatasan dana, sementara mereka mengelola berbagai warisan sejarah-budaya, yang sebagian bernilai komersial tinggi.

3.3. Misi dan Fungsi Museum

Dalam pembahasan ini, MISI diartikan sebagai tugas penting atau tugas utama suatu lembaga, terkait maksud dan tujuan (*purpose*) pendirian lembaga tersebut. FUNGSI diartikan sebagai maksud penggunaan lembaga tersebut saat dibangun dan didirikan, maka fungsi bersifat lebih permanen, dan melekat pada lembaga tersebut. Sedangkan PERAN dimaknai sebagai kegunaan atau fungsi yang tidak permanen, dijalankan dalam konteks ruang dan waktu. Peran dapat berubah sesuai kebutuhan.

3.3.1. MISI

Berpijak pada batasan tentang museum yang dirumuskan oleh ICOM (*International Council Of Museums*), misi museum pada pokoknya adalah:

- Pembelajaran/pendidikan (edukasi),
- Kajian (studi),
- Kesenangan/hiburan (rekreasi).

MISI EDUKASI

Meski museum pada dasarnya ditujukan bagi semua kalangan masyarakat, namun dengan penekanan pada misi pembelajaran/pendidikan, umumnya museum perlu menajamkan fokus komunikasi pada kelompok pengunjung anak-anak dan remaja, atau secara umum di Indonesia berarti adalah kalangan pelajar. Dengan sasaran khusus pada kalangan pelajar, dalam tataran implementasi program maupun tata pameran, perlu adanya penguatan pada aspek kognitif, afektif, maupun psiko-motorik yang sesuai dengan sasaran tersebut.

Berkenaan dengan penekanan dan penajaman fokus program pada kelompok pelajar tersebut, perlu pengembangan tema-tema substansial seperti "Pembangunan Karakter Bangsa" atau "Penguatan Jati Diri Bangsa" yang secara umum dapat ditempatkan dalam kerangka revolusi mental bangsa. Pada tataran implementatif, tema-tema tersebut dapat diukur melalui tingkatan apresiasi (penghargaan) publik terhadap karya infrastruktur publik yang merupakan karya bangsa Indonesia sendiri.

Dalam pelaksanaan misi pembelajaran/pendidikan ini, museum menempati posisi sebagai penyedia muatan komplementer maupun suplementer. Museum bukanlah lembaga pendidikan formal. Museum tak perlu berupaya menggantikan posisi sekolah, namun museum dapat mengisi kekosongan atau menambah muatan pembelajaran yang ada di sekolah. Singkatnya, museum adalah penyedia bukti fisik dan visual dari muatan belajar.

MISI STUDI/KAJIAN

Dalam penyelenggaraan misi kajian, khususnya di Indonesia, museum pun menempati posisi sekunder. Museum-museum di negara yang lebih maju memang telah dapat berkembang sebagai lembaga pengkajian/penelitian.

Museum PU dapat menjadi penyelenggara kajian sekunder, dengan memanfaatkan kajian primer dan data primer yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga lain. Fungsi kajian primer akan diemban oleh lembaga akademik (universitas) atau lembaga penelitian primer lainnya. Dengan pengkhususan pada kajian sekunder bidang Pekerjaan Umum, Museum PU dapat memposisikan diri sebagai mediator/penghubung antara lembaga kajian primer bidang Pekerjaan Umum dengan masyarakat. Museum juga dapat berfungsi sebagai komunikator hasil kajian.

MISI HIBURAN/REKREASI

Dalam sistem pariwisata atau rekreasi/hiburan, museum menjalankan misi khusus, yaitu rekreasi/hiburan dengan muatan edukatif (ilmu-pengetahuan),

edutainment. Dalam konteks *edutainment* ini, Museum PU diharapkan dapat menularkan rasa bangga (afeksi) terhadap karya infrastruktur bangsa; maupun mengalirkan dan menyebarkan pengetahuan (kognisi) tentang perjalanan sejarah-budaya bidang Pekerjaan Umum didukung dengan program interaktif (psiko-motorik) yang sesuai.

3.3.1. FUNGSI

Fungsi museum pada pokoknya akan menyangkut dua hal, yaitu:

- a.** Pelestarian Koleksi
- b.** Komunikasi Publik

Mengacu pada batasan ICOM, maka fungsi museum adalah:

- 1.** Mengumpulkan,
- 2.** Merawat,
- 3.** Meneliti,
- 4.** Mengkomunikasikan, dan
- 5.** Memamerkan,

warisan budaya benda dan tak-benda, dari manusia maupun lingkungan hidup manusia (alam).

Berpijak pada Undang-undang Cagar Budaya, fungsi museum adalah,

- 1.** Melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan (3 aspek pelestarian) koleksi
- 2.** Mengkomunikasikan kepada masyarakat.

Pengertian koleksi di sini bisa berarti benda bergerak, atau bangunan/struktur yang in-situ (tak bergerak).

Dalam penerapannya tak tertutup kemungkinan untuk menggabungkan fungsi-fungsi dari dua batasan tersebut. Khususnya untuk museum yang masih dalam proses pendirian, dapat dilakukan penekanan-penekanan khusus pada fungsi-fungsi tertentu.

3.4. Peran Museum dalam Masyarakat

Selain misi dan fungsi utamanya, museum juga dapat menjalankan peran dalam konteks lingkungannya, antara lain sebagai:

- Pusat Budaya
- Pusat Sosial
- Pusat Informasi
- Forum Kajian
- Forum Inspirasi

PUSAT BUDAYA

Dalam pengembangan kehidupan budaya kota besar (*urban culture*), Museum PU yang ditempatkan dalam Gedung Heritage dapat mengembangkan peran sebagai salah satu Pusat Budaya di Jakarta. Penyelenggaraan berbagai kegiatan seni-budaya secara rutin dan bersinambungan, dengan sendirinya akan mengangkat posisi Museum PU sebagai salah satu Pusat Budaya dalam konteks *urban culture* Jakarta.

PUSAT SOSIAL

Museum PU juga diharapkan dapat menjadi Pusat Sosial, setidaknya untuk lingkungan terdekatnya. Penyelenggaraan aneka program sosial-kemanusiaan ataupun program komunikasi publik, akan menjadikan Museum PU sebagai ujung tombak Kementerian PU dalam mendekatkan diri dengan masyarakat.

PUSAT INFORMASI

Sebuah museum dengan sendirinya haruslah menjadi Pusat Informasi. Dalam perkembangan lanjutannya, Museum PU perlu menguatkan diri agar dapat berperan sebagai rujukan informasi bagi masyarakat, tentang berbagai hal terkait Pekerjaan Umum ataupun sejarah-budaya bidang PU. Jejaraing kerja dengan perpustakaan, ataupun penerbitan aneka produk publikasi, merupakan program-program yang perlu dikembangkan dalam konteks peran Museum PU sebagai Pusat Informasi.

FORUM KAJIAN

Dengan sasaran khusus pada kalangan mahasiswa dari bidang-bidang terkait Pekerjaan Umum (Teknik Sipil, Teknik Lingkungan, Teknik Elektro, Planologi, dsb.), Museum PU dapat mengembangkan peran sebagai Forum Kajian. Peran ini perlu diolah dengan membangun kerjasama kemitraan dengan berbagai perguruan tinggi atau lembaga penelitian terkait bidang PU. Dengan demikian Museum PU tidak hanya berfungsi sebagai penyimpan bukti sejarah-budaya infrastruktur Indonesia, tetapi juga dapat berperan dalam pengembangan bidang infrastruktur di Indonesia.

FORUM INSPIRASI

Selain dalam format Forum Kajian tersebut, pengembangan bidang infrastruktur di Indonesia juga dapat dikembangkan oleh Museum PU, jika museum ini mampu menjadikan diri sebagai Forum Inspirasi. Belajar dari masa lalu, untuk mengolah masa kini, dan mengembangkan diri untuk menghadapi masa depan. Itulah sejatinya peran museum dalam kehidupan masyarakat.

Dalam perspektif lain, peran museum juga dapat dijabarkan sebagai berikut.

- 1) Museum sebagai Forum: tempat terjadinya diskusi masalah-masalah sosial dan budaya yang diwujudkan dalam bentuk visual atau forum lainnya. Museum harus berfungsi sebagai wadah kajian akademis dan intelektual. Koleksi Museum mampu memberikan visualisasi dari kearifan nasional yang memiliki nilai-nilai luhur dan berkontribusi memperkuat unsur budaya Indonesia.
- 2) Museum sebagai "Contact Zones": dalam kegairahan ekonomi dan industri kreatif beserta kegiatan ikutannya, museum bermanfaat menjadi ruang publik, menjadi wahana aktivitas organisasi kemasyarakatan.
- 3) Museum sebagai "Technical Laboratorium": mencerdaskan kehidupan Bangsa, membentuk kepribadian atau karakter bangsa, menanamkan konsep ketahanan nasional dan wawasan nusantara. Melalui khasanah

keaneka-ragaman koleksi, museum mengangkat budaya daerah dari berbagai peradaban sebagai dampak positif pembangunan infrastruktur dari berbagai etnis dan suku bangsa.

- 4) Museum sebagai wahana *edutainment* dalam pembangunan kepariwisataan nasional. Koleksi Museum berperan lebih mengenalkan kearifan lokal dan lansekap budaya seluruh Indonesia. Melalui koleksi museum, terbuka transformasi informasi untuk menunjang promosi obyek wisata (infrastruktur karya Kementerian "PU" dan aktivitas kepariwisataan turunannya) di propinsi/kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Saat ini peran museum dalam masyarakat memang semakin terasa penting, sehingga sejak tahun 1977 telah ditetapkan tanggal 18 Mei sebagai Hari Museum Internasional (*International Museum Day*), yang perayaannya dikoordinasi oleh ICOM. Acaranya memiliki sebuah tema spesifik yang selalu berubah setiap tahun.

Hari Museum Internasional menyediakan peluang bagi pekerja museum untuk bertemu dengan masyarakat dan memperingatkan mereka mengenai tantangan yang dihadapi oleh museum. Hari Museum Internasional bertujuan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat akan peranan museum dalam perkembangan masyarakat pada saat ini, dalam skala internasional.

Sejak tahun 2010, tema-tema Hari Museum Internasional umumnya terkait dengan berbagai perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, yang terus berubah dengan cepat. Penting bagi museum untuk mengeksplorasi topik-topik tersebut, dengan mengadakan berbagai kegiatan. Teknologi baru, ide baru, sebuah iklim yang stabil, dan media sosial, merupakan lokasi yang sedang dipergunakan museum dan masyarakat pada saat ini. Lima hal yang terkait dengan tema yang dieksplorasi oleh museum:

- Peranan museum dalam masyarakat yang “baru”. Museum menghadapi tantangan unik terkait dengan lingkungan sosial, politik dan ekologi mereka. Museum memerankan peranan penting dalam perkembangan pendidikan dan demokrasi, di saat yang sama juga sebagai saksi masa lalu dan penjaga harta karun kemanusiaan untuk generasi yang akan datang.
- Keseimbangan lingkungan. Museum dengan konstan berkembang dan mengkaji ulang apa yang mereka butuhkan untuk mengurangi kebutuhan mereka terhadap sumber daya lingkungan. Ketika melakukannya, mereka memberikan nasihat untuk keseimbangan lingkungan, dan memberikan contoh kepada lainnya.
- Menggunakan masa lalu untuk membangun masa depan. Museum memberi keyakinan bahwa mereka adalah penjaga antar generasi untuk warisan budaya dan menciptakan hubungan dengan masa lalu.
- Media baru. Museum dengan cepat belajar menggunakan beberapa dari cara komunikasi baru yang terkait dengan media baru dan memperlihatkan kemampuan yang baik untuk hal ini.
- Inovasi. Untuk merespon kepada perubahan sosial dan beradaptasi terhadap harapan pengunjung, museum melakukan inovasi.

3.5. Bentuk dan Jenis Museum

Museum sering diartikan publik sebagai sebuah gedung. Memang bangunan atau areanya akan disebut pula sebagai museum, namun secara konseptual pengertian museum merujuk kepada suatu lembaga.

Museum adalah lembaga sosial yang sangat beraneka-ragam bentuk dan jenisnya, seperti perbandingan dalam uraian berikut.

- ada museum yang mengurus bukti alam atau ekofak (Museum Kehutanan, Senayan, atau Museum Geologi, Bandung); yang mengelola koleksi budaya (Museum Asmat, TMII), sampai yang mengurus karya seni (Museum Affandi, Yogyakarta);

- dari yang mengelola koleksi sekecil perangko (Museum Perangko, TMII), sampai yang koleksinya berukuran besar (Museum Kereta Api, Ambarawa), semua menyebut diri museum;
- ada yang bertema abstrak (Museum Kebangkitan Nasional, Kwitang, atau Museum Joang '45, Menteng), ada yang berbasis peristiwa nyata (Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Menteng, atau Museum Lubang Buaya, Pondok Gede);
- ada yang berlahan luas, sehingga ada museum dalam museum (TMII, dikategorikan sebagai museum, di dalamnya terdapat belasan museum); atau Taman Arkeologi Pulau Onrust, sebuah *outdoor* museum yang meliputi 4 buah pulau (di dalamnya ada lagi Museum Onrust); ada yang cukup menempati satu ruangan saja (Museum Kartini, Rembang).

Pada dasarnya, bentuk museum dapat dikategorikan sebagai:

- a. Museum luar ruang
- b. Museum dalam ruang

Jenis museum secara umum terbagi menjadi:

1. Museum sejarah alam
2. Museum sejarah (manusia)
3. Museum seni-budaya

3.6. Kondisi Permuseuman di Indonesia

Di Indonesia telah banyak museum didirikan, namun masih terdapat beberapa kekurangan dan kelemahan dalam mengelola museum, sehingga kunjungan masyarakat ke museum sangat kurang. Di Jakarta lebih kurang ada 58 museum yang beraneka ragam keunikannya, dengan tema, koleksi, dan kepemilikan yang berbeda-beda, berada dalam gedung yang berbeda pula gaya bangunannya.

Untuk menarik pengunjung, beberapa strategi diterapkan oleh museum, antara lain dengan mengadakan lomba, penilaian terhadap museum-museum yang telah berdiri, juga dilakukan pembinaan dan pendidikan SDM sebagai pengelola museum, merenovasi bangunan gedung museum dengan menambahkan area rekreasi untuk anak-anak, menambah fasilitas publik misalnya restoran, bank, dan lain sebagainya.

Permasalahan yang dihadapi oleh museum dapat dikelompokkan dalam dua hal, yaitu:

1. Kelemahan SDM

Kelemahan SDM museum yang menyebabkan masyarakat kurang tertarik untuk berkunjung ke museum, antara lain:

1. Pengetahuan (*knowledge*)

- 1) Kurang memahami isi/informasi dari sebuah museum.
- 2) Kurangnya wawasan dan makna budaya/teknologi.

2. Ketrampilan (*skill*)

- 1) Kurang dalam kemampuan berbahasa asing.
- 2) Penempatan karyawan tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan.

3. Sikap (*attitude*)

- 1) Tidak peduli, masa bodoh.
- 2) Kurang ramah.
- 3) Lebih mementingkan diri sendiri.
- 4) Penampilan diri sembrono, kurang rapi.

2. Kekurangan Sumber Dana dan Kelemahan Penataan Ruang

1. Pendanaan

- 1) Pembiayaan lebih besar daripada dana yang tersedia.
- 2) Hanya menggantungkan diri terhadap dana dari pemerintah.

2. *Display*

- 1) Penataan interior dan pencahayaan kurang, sehingga memberi kesan suram dan statis, hanya seperti gudang barang-barang saja.
- 2) Tidak memanfaatkan teknologi yang mutakhir.

3. *Signage* kurang informatif, tidak ada kegiatan untuk keluarga, sehingga:

- 1) Membingungkan pengunjung.
- 2) Mengurangi daya tarik.
- 3) Membuat pengunjung merasa bosan.



BAB IV

TINJAUAN UMUM tentang PEKERJAAN UMUM

4.1. Pengertian Pekerjaan Umum

Istilah Pekerjaan Umum (PU) adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda "*Openbare Werken*" yang pada jaman belanda disebut "*Waterstaat Werker*". Dalam bahasa Inggris dikenal istilah *Civil Public Works*. Secara akademik, bidang ini terkait dengan ilmu Teknik Sipil.

Dahulu Pekerjaan Umum adalah bidang yang hampir sepenuhnya diselenggarakan negara atau pemerintah. Karenanya, terminologi Pekerjaan Umum di Indonesia seringkali dikaitkan langsung dengan nomenklatur struktur pemerintahan. Dalam perkembangannya kini, kalangan swasta pun sudah banyak terlibat pada bidang Pekerjaan Umum ini, melalui konsesi dari penyelenggara negara.

Secara luas cakupan bidang Pekerjaan Umum adalah:

- Infrastruktur Darat (*Teknik Sipil kering – jalan, jembatan, dll.*)
- Infrastruktur Air (*Teknik Sipil basah – bendungan, kanal air, dll.*)
- Infrastruktur Sumber Energi
- Gedung Publik (*stadion, pasar, terminal, masjid, museum dll.*)
- Pemukiman dan Perumahan
- Tata Ruang dan Wilayah, dll.

4.2. Pekerjaan Umum dalam Sejarah-Budaya Indonesia

Bukti-bukti sejarah-budaya Nusantara cukup banyak menunjukkan proses kerja maupun hasil kerja di bidang infrastruktur, sejak masa Klasik (pengaruh Hindu-Buddha) sampai ke masa kolonial. Sebagian berupa catatan sejarah, namun banyak pula yang berupa tinggalan fisik warisan infrastruktur.

Beberapa bukti sejarah-budaya infrastruktur antara lain:

- Pembangunan kanal kerajaan Tarumanegara, abad V.

Dituliskan dalam Prasasti Tugu, ditemukan di kampung Batutumbuh, Desa Tugu, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat (pada koordinat 0°06'34,05" BT dan 6°07'45,40" LS); berhuruf Pallawa, berbahasa Sansekerta, berbentuk seloka dengan metrum Anustubh. Dituliskan pada batu monolit setinggi sekitar 1 m. Secara paleografis diduga berasal dari pertengahan abad V; dari gaya tulisannya, penulisnya diduga sama dengan penulis Prasasti Cidanghiyang. Pada tahun 1911, atas prakarsa P. de Roo de la Faille, Prasasti Tugu dipindahkan dari lokasi penemuannya ke *Museum Bataviaasch Genootschaap van Kunsten en Wetenschappen*. Saat ini tersimpan sebagai koleksi Museum Nasional Indonesia, nomor inventaris D 124.

Isi Prasasti Tugu tentang penggalian Sungai Candrabaga (Kali Bekasi) atas perintah Rajadirajaguru Jayasingawarman, untuk mengalirkannya ke laut (dilakukan sebelumnya); serta penggalian Sungai Gomati atas perintah Raja Purnawarman, pada tahun ke-22 masa pemerintahannya. Penggalian saluran/kanal sepanjang 6122 tombak (sekitar 12 km), melintasi tanah milik Yang Mulia Pendeta, nenekda raja Purnawarman, dilakukan mulai tanggal 8 paro-gelap bulan Phalguna, selesai tanggal 13 paro terang bulan Caitra, yaitu selama 21 hari. Raja Purnawarman menghadiahkan 1000 ekor sapi kepada para brahmana yang melaksanakan selamat atas selesainya pembangunan kanal (saluran) tersebut.

Pembangunan saluran itu dimaksudkan untuk mengatasi bencana banjir di musim hujan, serta kekeringan di musim kemarau.

- Pembangunan infrastruktur oleh Raja Airlangga, abad XI

Raja Airlangga, dari kerajaan Mataram–Kahuripan, dikenal sebagai salah satu raja Jawa yang banyak melaksanakan pembangunan infrastruktur, antara lain:

- Membangun Sri Wijaya Asrama, tahun 1036;
- Membangun bendungan Waringin Sapta, tahun 1037, untuk mencegah banjir musiman;
- Memperbaiki pelabuhan Hujung Galuh, di muara Kali Brantas, dekat Surabaya sekarang;
- Membangun jalan-jalan yang menghubungkan daerah pesisir ke pusat kerajaan;
- Meresmikan pertapaan Gunung Pucangan, tahun 1041;
- Memindahkan ibu kota dari Kahuripan ke Daha.

- Infrastruktur kerajaan Majapahit, abad XIV

- Wilayah Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur, yang diperkirakan sebagai ibukota Kerajaan Majapahit, adalah bekas kota dengan tata-air yang terstruktur baik, dilengkapi kanal-kanal dan waduk buatan (kolam Segaran);
- Menurut kitab Nagarakertagama, abad ke-14, Raja Hayam Wuruk seringkali melakukan kunjungan kenegaraan (darmawisata), meninjau daerah-daerah Majapahit di wilayah Jawa Timur. Perjalanan dilakukan setiap tahun, masing-masing dengan rute yang berbeda. Rombongan kerajaan terdiri dari puluhan kereta kuda dan kereta lembu, dikawal ribuan prajurit berkuda dan infantri. Besarnya rombongan kerajaan menimbulkan dugaan, bahwa saat itu jalan-jalan antar kota di Majapahit berukuran cukup besar, dengan kondisi jalan yang cukup baik.

- Infrastruktur di Kesultanan Banten, abad XVII

- Pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa (namanya berarti: pembangun sistem pengairan), antara tahun 1663-1667,

dibangun 30-40 km kanal baru dengan mempekerjakan 16.000 orang. Sistem pengairan ini mampu mendukung pembukaan lahan pertanian baru seluas 30-40.000 hektar sawah, dan ribuan hektar perkebunan kelapa. Untuk pengembangannya, ditempatkan sekitar 30.000 petani di lahan tersebut, termasuk orang Bugis dan Makassar. Untuk pengembangan perkebunan tebu, didatangkan saudagar-saudagar Tiongkok;

- Ibukota Kesultanan Banten, yang air-tanahnya payau, dilengkapi dengan sistem penjernihan air, yang disebut Pengindelan. Sumber air berasal dari danau buatan di desa Margasana, disebut Tasikardi (secara harafiah berarti danau buatan). Dari Tasikardi air disalurkan ke Keraton Surosowan (berarti: Kota Intan), dengan pipa-pipa tanah liat berdiameter sekitar 2,4 m yang ditanam di dalam tanah, melalui 3 tahap penyaringan: Pengindelan Abang (Merah), Pengindelan Putih, dan Pengindelan Mas.
- Pemukiman di Ibukota Kesultanan Banten ditata dengan sistem *cluster*. Terdapat sekitar 30 *cluster*, dibagi berdasarkan beberapa kategori, misalnya: menurut profesi (Penganjun, wilayah pembuat tembikar; Kamasan, wilayah perajin mas); menurut etnik (Pecinan untuk orang Cina; Pekojan untuk orang Koja, Muslim-India).

- Jalan tol di Kesultanan Mataram

Menurut beberapa delegasi diplomatik Eropa, jalan raya menuju ibukota Mataram di selatan Jawa Tengah umumnya sangat baik, dilengkapi dengan beberapa pos tol-jalan (pemungut pajak jalan). Pos pajak (tol) juga terdapat pada titik-titik penyeberangan sungai.

Tradisi ini masih berlanjut sampai masa Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Pada abad ke-19, terdapat ratusan pos pajak (tol) di seluruh wilayah eks-Mataram. Sebagian besar pos pajak (tol) itu dijual konsesinya kepada pedagang-pedagang Tiongkok, yang menggunakan pos itu sebagai basis perdagangan candu. Kondisi ini tak disukai P. Diponegoro, dan menjadi salah satu sebab timbulnya Perang Jawa.

- Bandar dan pelabuhan di Nusantara

Di berbagai wilayah di pesisir kepulauan Nusantara, tersebar puluhan bandar (kota pelabuhan). Umumnya berlokasi di teluk atau muara sungai. Bandar-bandar itu merupakan tinggalan infrastruktur pelabuhan, yang menjadi bukti-bukti pembangunan infrastruktur Nusantara.

4.3. Sejarah Kementerian Pekerjaan Umum

Pekerjaan Umum di Masa Kolonial Belanda

Di lingkungan Pusat Pemerintahan dibina oleh *Dep. Van Verkeer & Waterstaat* (*Dep V&W*) yang sebelumnya terdiri dari 2 departemen, yaitu *Dept. Van Governements Bedri Jven* dan *Dept. Van Burgerlijke Openbare Werken*. Departemen V dan W dikepalai oleh seorang Direktur, membawahi beberapa *Afdelingen* dan *Diensten* sesuai dengan tugas/wewenang departemen ini. Yang meliputi Bidang PU (*Openbare Werken*), termasuk *Afdeling Waterstaat*, dengan *Onder Afdelinger* yaitu: 1. *Lands gebouwen*, 2. *Wegen*, 3. *Irrigate & Assainering*, 4. *Water Kracht*, dan 5. *Constructie bureau* (untuk pembangunan jembatan). Di samping yang tersebut di atas, yang meliputi Bidang PU juga adalah *Afd. Havenwezen* (Pelabuhan), *Afd. Electricitswezen* (kelistrikan) dan *Afd. Luchtvaart* (Penerbangan sipil).

Organisasi PU yang berada di daerah-daerah, di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, urusan *waterstaat/open barewerken* diserahkan kepada pemerintahan provinsi yang disebut "*Provinciale Waterstaat Dienst*" dan dikepalai oleh seorang *Hoofd Provinciale Waterstaat Dienst*.

Pekerjaan Umum di Masa Pendudukan Jepang

Setelah Belanda menyerah kepada Jepang dalam Perang Pasifik tahun 1942, maka daerah-daerah di Indonesia dibagi oleh Jepang dalam 3 wilayah pemerintahan, yaitu Jawa/Madura, Sumatera dan Indonesia Timur, dan tidak ada pusat pemerintahan Indonesia yang menguasai ke 3 wilayah pemerintahan tersebut.

Di Bidang Pekerjaan Umum, pada tiap-tiap wilayah organisasi Pemerintahan Militer Jepang tersebut di atas diperlukan organisasi zaman Hindia Belanda dan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dari pihak Jepang. Kantor pusat "V&W" di Bandung dinamakan "*Kotubu Bunsitsu*". Sejak saat itu istilah "Pekerjaan Oemoem" (P.O), "Oeroesan Pekerdjaan Oemoem" (O.P.O), "Pekerjaan Umum" (PU) di samping "*Doboku*", lazim dipergunakan. *Kotubu Bonsitsu* di Bandung hanya mempunyai hubungan dengan wilayah pemerintahan di Jawa/Madura, tidak ada hubungan dengan luar Jawa. Organisasi pekerjaan umum di daerah-daerah dan di karesidenan-karesidenan pada umumnya berdiri sendiri-sendiri. Sistem pelaksanaan pekerjaan ada yang mempergunakan sistem nama zaman *Nederlands Indie* atau menurut sistem Jepang.

Pekerjaan Umum Sejak Proklamasi Kemerdekaan (zaman Indonesia Merdeka)

Setelah Indonesia memproklamkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, semenjak itu pemuda-pemuda Indonesia mulai berangsur-angsur merebut kekuasaan pemerintahan dari tangan Jepang, baik di dalam pusat pemerintahan (Jakarta/Bandung) maupun juga pemerintahan di daerah-daerah.

Sesudah pemerintahan Indonesia membentuk kabinet yang pertama, para menteri mulai menyusun organisasi serta stafnya. Pekerjaan Umum pada saat itu, tahun 1945, berpusat di Bandung, dengan mengambil tempat bekas gedung *Verkeer & Waterstaat* yang lebih dikenal dengan nama "Gedung Sate".

Ketika para pejuang di Bandung ingin mengembalikan kekuasaan pemerintah dari Hindia Belanda ke RI, NICA (Belanda) datang mengikuti tentara sekutu masuk ke Indonesia. Akibat tindakan pemerintah Belanda ini, maka terjadilah pertentangan fisik dengan pemuda Indonesia yang ingin mempertahankan tanah air, berikut gedung-gedung yang telah didudukinya, antara lain "Gedung Sate" yang telah menjadi Gedung Departemen Pekerjaan Umum pada waktu itu. Peristiwa bersejarah itu dikenal dengan peristiwa "3 Desember 1945". Pada

waktu revolusi fisik dari tahun 1945 s.d. 1949, Pemerintah Pusat RI di Jakarta terpaksa mengungsi ke Purworejo untuk selanjutnya berpindah ke Yogyakarta, begitu juga dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Sesudah pemerintah Hindia Belanda mengakui kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1949, pusat pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta dipindahkan kembali ke Jakarta.

Sejak tahun 1945, Pekerjaan Umum (PU) telah sering mengalami perubahan, baik pimpinan maupun organisasi, sesuai situasi politik pada waktu itu. Sebagai gambaran garis besar organisasi PU, dapat diuraikan sebagai berikut.

- Sebelum tentara Belanda masuk ke Yogyakarta, Kementerian PU dan Perhubungan dibagi dalam 8 Jawatan dan 4 Balai.
- Khusus pada masa Republik Indonesia Serikat, Kementerian Perhubungan dan PU RIS dibagi dalam beberapa departemen, jawatan, dan beberapa instansi yang berhubungan erat dengan tugas dari Dep. PU RIS.
- Kementerian Perhubungan PU RIS tersebut terdiri atas penggabungan 3 Departemen pra federal, yaitu:
 - Departemen Verkeer, Energie dan Mynbouw (kecuali Mynbouw yang masuk dalam Kementerian Kemakmuran).
 - Departemen Van Waterstaat di Wederopbouw.
 - Departemen Van Scheepvaart.

Penggabungan 3 departemen dari pemerintahan pra federal dalam satu Kementerian, yaitu Kementerian Perhubungan, Tenaga dan PU RIS, dianggap perlu supaya hubungan 3 departemen tersebut satu dengan yang lain menjadi sangat erat. Terlebih lagi jika diingat, bahwa untuk membangun negara perlu diadakan koordinasi yang baik, dan juga dipandang penting adanya tenaga ahli supaya dapat melancarkan semua tugas yang dibebankan pada 3 Kementerian tersebut di atas, yaitu Kementerian Perhubungan, Tenaga dan PU RIS.

Khusus pada permulaan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, susunan Kementerian Pekerjaan Umum dibuat berbeda dengan sebelumnya. Dalam masa sebelum G 30 S/PKI terjadilah dalam sejarah pemerintahan RI, suatu kabinet yang besar disebut dengan nama Kabinet DwiKora atau Kabinet 100 Menteri, dimana pada masa itu ikut mengalami perubahan organisasi menjadi 5 departemen di bawah kompartemen PUT yang membawahi:

- Departemen Listrik dan Ketenagakerjaan,
- Departemen Bina Marga,
- Departemen Cipta Karya Konstruksi,
- Departemen Pengairan Dasar,
- Departemen Jalan Raya Sumatera.

Setelah peristiwa G 30 S/PKI, pemerintah segera menyempurnakan Kabinet Dwikora dengan menunjuk Ir. Soetami sebagai menteri PUT untuk memimpin Kompartemen PUT. Kabinet yang di sempurnakan itu tidak lama usianya. Dalam Kabinet Ampera, sebagai kabinet pertama dalam masa orde baru, organisasi PUT kembali dibentuk dengan Ir. Soetami sebagai menteri. Dengan Surat Keputusan Menteri PUT tertanggal 17 Juni 1968 no. 3/PRT/1968, dan diubah dengan Peraturan Menteri PUT tanggal 1 Juni 1970 no. 4/PRT/1970 Departemen PUT telah memiliki suatu susunan Struktur Organisasi.

Sebagai gambaran lebih jauh, pembagian tugas-tugas dalam lingkungan Dep. PUT, maka pada waktu itu azas tugas-tugas PU telah diserahkan pada kewenangan di setiap daerah di seluruh Indonesia.

4.4. Visi, Misi, dan Organisasi Kementerian Pekerjaan Umum

Visi:

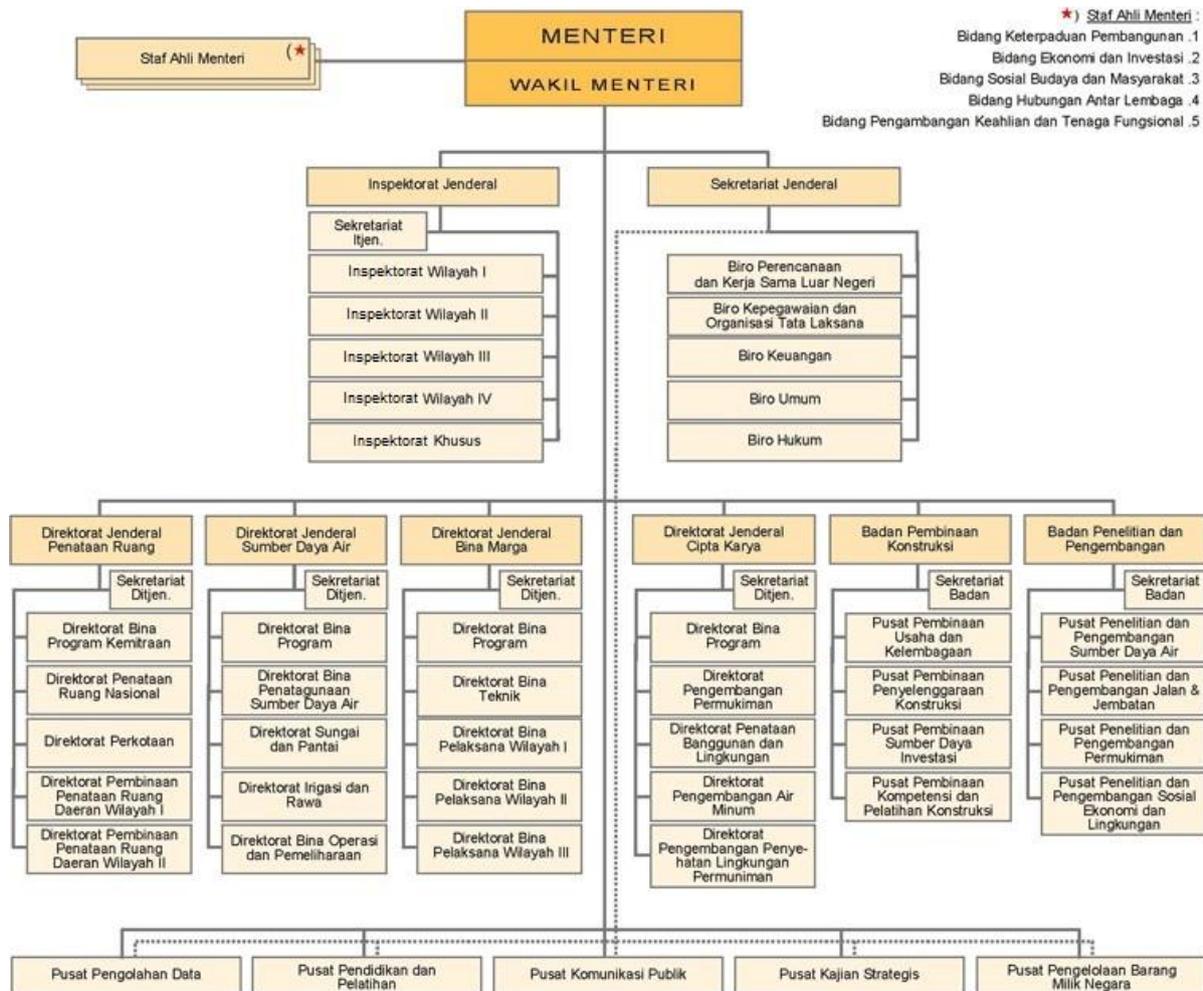
Tersedianya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Pemukiman yang Andal untuk Mendukung Indonesia Sejahtera 2025.

Misi:

1. Mewujudkan penataan ruang sebagai acuan matra spasial dari pembangunan nasional dan daerah serta keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman berbasis penataan ruang dalam rangka pembangunan berkelanjutan.
2. Menyelenggarakan pengelolaan SDA secara efektif dan optimal untuk meningkatkan kelestarian fungsi dan keberlanjutan pemanfaatan SDA serta mengurangi resiko daya rusak air.
3. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan jaringan jalan yang andal, terpadu dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif melalui pembinaan dan fasilitasi pengembangan infrastruktur permukiman yang terpadu, andal dan berkelanjutan.
5. Menyelenggarakan industri konstruksi yang kompetitif dengan menjamin adanya keterpaduan pengelolaan sektor konstruksi, proses penyelenggaraan konstruksi yang baik dan menjadikan pelaku sektor konstruksi tumbuh dan berkembang.
6. Menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan serta Penerapan IPTEK, norma, standar, pedoman, manual dan/atau kriteria pendukung infrastruktur PU dan permukiman.
7. Menyelenggarakan dukungan manajemen fungsional dan sumber daya yang akuntabel dan kompeten, terintegrasi serta inovatif dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.
8. Meminimalkan penyimpangan dan praktik-praktik KKN di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dengan meningkatkan kualitas pemeriksaan dan pengawasan profesional.

Struktur Organisasi Kementerian Pekerjaan Umum

Bagan Struktur Organisasi Kementerian Pekerjaan Umum sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut.



Sumber: Peraturan Menteri PU, NO.8 Tahun 2010

4.5. Karya-karya Utama, Tokoh, dan Peristiwa

Peran Pekerjaan Umum sejak zaman dahulu sangat besar dalam peradaban di Indonesia. Beberapa contoh yang dapat digunakan antara lain:

Era Sebelum Penjajahan

1. Subak

Subak adalah sebuah sistem irigasi persawahan di Bali, diciptakan lebih dari 1000 tahun yang lalu. Di Bali, irigasi bukan hanya sekedar mengalirkan air ke tanaman, namun juga dimanfaatkan untuk merekayasa sebuah ekosistem yang sangat kompleks. Sawah-sawah di Bali dibangun disekitar mata air, dan pembagian air dilakukan oleh pendeta. Subak adalah sistem irigasi tradisional berkelanjutan yang mengikat tali persaudaraan di antara para petani dengan para pendeta kuil di Bali dalam sebuah pusat komunitas

desa, Bale Banjar. Manajemen air dikelola oleh para pendeta dalam filosofi Tri Hita Karana yaitu keseimbangan hubungan antara Manusia, Bumi dan Dewa. Filosofi ini berasal dari agama Hindu.

Era Penjajahan

2. Jalan Raya Pos (Jalan Raya Anyer–Pancarukan)

Jalan Raya Pos adalah jalan yang panjangnya kurang lebih 1000 km yang terbentang sepanjang utara Pulau Jawa, dari Anyer sampai Pancarukan. Dibangun pada masa pemerintahan Gubernur-Jenderal Herman Willem Daendels. Pada tiap-tiap 4,5 kilometer didirikan pos sebagai tempat perhentian dan penghubung pengiriman surat-surat. Tujuan pembangunan Jalan Raya Pos adalah memperlancar komunikasi antar daerah yang dikuasai Daendels di sepanjang Pulau Jawa dan sebagai benteng pertahanan di Pantai Utara Pulau Jawa. Untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, Daendels membutuhkan armada militer yang kuat dan tangguh. Daendels membentuk pasukan yang berasal dari masyarakat pribumi. Daendels kemudian mendirikan pendidikan militer di Batavia, dan tempat pembuatan atau pabrik senjata di Semarang.

Ketika baru saja menginjakkan kakinya di Pulau Jawa, Daendels berangan untuk membangun jalur transportasi sepanjang pulau Jawa guna mempertahankan Jawa dari serangan Britania. Angan-angan Daendels untuk membangun jalan yang membentang antara Pantai Anyer hingga Pancarukan, direalisasikannya dengan mewajibkan setiap penguasa pribumi lokal untuk memobilisasi rakyat, dengan target pembuatan jalan yang ditetapkan saat itu.

Era Kemerdekaan

3. Bendungan Sutami

Merupakan bendungan yang menciptakan suatu waduk karena tertahannya aliran Sungai Brantas. Waduk terbentuk untuk menampung aliran sungai Brantas. Waduk ini terletak di Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Nama populer untuk waduk ini adalah Waduk Karangates. Bendungan ini dikelola oleh Perum Jasa Tirta I. Air Waduk Ir. Sutami ini berasal dari mata air di Gunung Arjuno dan ditambah air curah hujan.

Bendungan atau waduk Ir. Sutami mempunyai fungsi sebagai berikut.

- Pengendali banjir dengan kala ulang 50 tahun setara 1.650 m³/detik,
- Pembangkit listrik dengan daya 3 x 35.000 kwh (488 juta kwh/tahun),
- Penyediaan air irigasi 24 m³/dt pada musim kemarau (seluas 34.000 ha) melalui pengaliran ke hilir,
- Pariwisata dan perikanan darat.

Pariwisata di waduk Ir. Sutami saat ini dikelola oleh PJB (PT Pembangkit Jawa-Bali) setelah sebelumnya dikelola oleh Perum Jasa Tirta I.

Perikanan di sini dilakukan oleh warga setempat dengan menggunakan jaring terapung yang biasa disebut keramba. Pemeliharaan ikan dengan memanfaatkan perairan di waduk Ir. Sutami ini terjadi sejak era reformasi, yang sebelumnya menangkap dan memelihara ikan di perairan ini dilarang oleh pihak pemilik bendungan.

Selain manfaat sebagai sarana pariwisata dan perikanan, Bendungan Sutami yang juga biasa disebut "dam" oleh masyarakat setempat ini juga memiliki manfaat lain, yaitu digunakan sebagai akses oleh para pengendara sepeda motor untuk melintas pada siang hari dengan membayar tiket. Mereka yang sering melintas mayoritas adalah warga

yang tinggal di wilayah selatan waduk, seperti warga Kalipare dan Donomulyo.

4. Waduk Jatiluhur

Waduk Jatiluhur atau Bendungan Jatiluhur terletak di Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat (lebih kurang 9 km dari pusat Kota Purwakarta). Bendungan Jatiluhur adalah bendungan terbesar di Indonesia. Bendungan itu dinamakan pemerintah sebagai Waduk Ir. H. Juanda, dengan panorama danau yang luasnya 8.300 ha. Bendungan ini mulai dibangun sejak tahun 1957 oleh kontraktor asal Perancis, dengan potensi air yang tersedia sebesar 12,9 miliar m³/th. dan merupakan waduk serbaguna pertama di Indonesia.

Di dalam Waduk Jatiluhur, terpasang 6 unit turbin dengan daya terpasang 187 MW dengan produksi tenaga listrik rata-rata 1.000 juta kwh setiap tahun, dikelola oleh Perum Jasa Tirta II.

Selain dari itu Waduk Jatiluhur memiliki fungsi penyediaan air irigasi untuk 242.000 ha sawah (dua kali tanam setahun), air baku air minum, budi daya perikanan dan pengendali banjir yang dikelola oleh Perum Jasa Tirta II.

Selain berfungsi sebagai PLTA dengan sistem limpasan terbesar di dunia, kawasan Jatiluhur memiliki banyak fasilitas rekreasi yang memadai, seperti *hotel dan bungalow, bar dan restaurant, lapangan tenis, bilyard, perkemahan, kolam renang dengan water slide, ruang pertemuan, sarana rekreasi dan olahraga air, playground* dan fasilitas lainnya. Sarana olahraga dan rekreasi air a.l. mendayung, selancar angin, kapal pesiar, ski air, boating dan lainnya.

Di perairan Danau Jatiluhur ini juga terdapat budidaya ikan keramba jaring apung, yang menjadi daya tarik tersendiri. Di waktu siang atau dalam keheningan malam kita dapat memancing penuh ketenangan sambil menikmati ikan bakar. Di kawasan ini pula kita dapat melihat Stasiun Satelit

Bumi yang dikelola oleh PT. Indosat Tbk. (± 7 km dari pusat Kota Purwakarta), sebagai alat komunikasi internasional.

Waduk Jatiluhur dapat dikunjungi melalui Jalan Tol Purbaleunyi (Purwakarta-Bandung-Cileunyi), keluar di Gerbang Tol Jatiluhur.

5. Jembatan Semanggi

Jembatan Semanggi adalah sebuah *fly-over* yang dibangun pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Jembatan ini disebut Jembatan Semanggi karena dibangun di kawasan Karet Semanggi, Setiabudi. Akan tetapi banyak juga yang mengatakan karena bentuknya yang seperti daun Semanggi maka istilah Jembatan Semanggi digunakan.

Jembatan ini membelah pusat kota Jakarta, menjadi penghubung antar wilayah di DKI Jakarta. Dengan dibangunnya jembatan Semanggi, maka wilayah di sekitarnya berkembang pesat dan menjadi pusat-pusat perdagangan serta perkantoran elit dan bergengsi. Di kawasan elit itu sampai di wilayah Kuningan disebut dengan kawasan segitiga emas dengan harga tanah yang kian hari kian membumbung tinggi.

6. Konstruksi Cakar Ayam

Konstruksi ini digunakan sebagai pondasi dalam pembangunan jalan raya di mana tanah di bawahnya mempunyai kategori kurang stabil. Penemu konstruksi ini adalah Prof. Dr. Ir. Sedyatmo. Sedyatmo pada masa lalu bekerja sebagai insinyur perencanaan di berbagai instansi pemerintah. Sedyatmo dikenal karena menemukan "Konstruksi Cakar Ayam" pada tahun 1962. Temuan dari Prof. Dr. Ir. Sedyatmo ini pada awal mulanya digunakan dalam pembangunan apron yang digunakan untuk Pelabuhan Udara Angkatan Laut Juanda, di Surabaya, dan juga untuk landasan bandara Polonia, di Medan, dan landasan bandara Soekarno-Hatta, di Jakarta. Hasil temuan tersebut telah dipatenkan dan digunakan di berbagai negara lain.

7. Sosrobahu

Teknik Sosrobahu merupakan teknik konstruksi yang digunakan terutama untuk memutar bahu lengan beton jalan layang yang ditemukan oleh Tjokorda Raka Sukawati. Dengan teknik ini, lengan jalan layang diletakan sejajar dengan jalan di bawahnya, kemudian diputar 90° sehingga pembangunannya tidak mengganggu arus lalu lintas jalan di bawahnya.

Teknik ini diciptakan oleh Ir. Tjokorda Raka Sukawati, direktur PT. Hutama Karya pada saat itu. Pada tahun 1980-an, Jakarta yang memang sudah mengalami kendala kemacetan lalu lintas, banyak membangun jalan layang sebagai salah satu solusi meningkatkan infrastruktur lalu-lintas. Sebagai kontraktor saat itu, PT. Hutama Karya mendapatkan order membangun jalan raya di atas jalan *by pass* A. Yani, di mana pembangunannya harus memastikan bahwa jalan itu harus tetap berfungsi. Teknik Sosrobahu dianggap sangat membantu dalam membuat jalan layang di kota-kota besar yang jelas memiliki kendala yakni terbatasnya ruang kota yang diberikan, terutama saat pengerjaan konstruksi serta kegiatan pembangunan, infrastrukturnya tidak boleh mengganggu kegiatan masyarakat kota khususnya arus lalu-lintas dan kendaraan yang tidak mungkin dihentikan hanya karena alasan pembangunan jalan.

8. Kompleks Perumahan Werdha Pura

Perumahan ini dibangun di pantai Sanur, Bali. Lokasi Werdha Pura Village Center berada di sentra wisata Sanur, di jalan Danau Tamblingan yang terletak 15 km sebelah Timur Bandar Udara Internasional Ngurah Rai. Werdha Pura menghadap ke pantai Sanur di kawasan pantai karang, sehingga di pagi hari kita dapat melihat *sunrise* atau matahari terbit yang sangat indah. Kompleks Werdha Pura didirikan pada tahun 1968, yang pada mulanya adalah Unit Instansi pelaksana penyelenggara pelatihan/seminar dan menjadi prototip permukiman di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum. Misi Pekerjaan Umum adalah memperkenalkan prototip perpaduan antara bangunan arsitektur tradisional Bali yang menggunakan material/ bahan bangunan lokal dengan sentuhan modern, dengan penataan kawasan yang asri dan harmonis.

Prototip bangunan ini ditujukan untuk mengenalkan arsitektur tradisional Bali dan lingkungannya. Prototip tersebut telah dicontoh oleh masyarakat, khususnya dalam pembangunan untuk fasilitas pariwisata yang digunakan di Sanur, Kuta, Gianyar, Karangasem, Buleleng, Jembrana dan juga berbagai akomodasi pariwisata lain yang menggunakan prototip kompleks Werdha Pura Village Center sebagai sumber referensi tentang bangunan berarsitektur Bali.

Peran lain dari Werdha Pura Village Center adalah memfasilitasi berbagai pelatihan, pertemuan ilmiah dalam lingkungan Departemen Pekerjaan Umum di waktu-waktu tertentu. Di samping itu Werdha Pura Village Center juga terbuka untuk masyarakat yang ingin mengembangkan nilai budaya dan kegiatan sosial masyarakat.



BAB V

RENCANA PENDIRIAN MUSEUM PU

5.1. Nama dan Makna

Awalnya, terdapat dua pilihan nama yang akan digunakan sebagai identitas, yaitu:

- a. Museum Kementerian Pekerjaan Umum, disingkat Museum Kementerian PU.
- b. Museum Pekerjaan Umum, disingkat Museum PU.

Dalam penentuan nama museum perlu dipertimbangkan pula kaitan dengan Visi dan Misi pendirian museum. Museum PU adalah wahana untuk mengenal dan menghayati lebih dalam tentang sejarah Ilmu-pengetahuan di bidang Pekerjaan Umum, selain Sejarah lembaga Kementerian Pekerjaan Umum itu sendiri. Perlu ada alternatif bahwa museum ini adalah museum sejarah atau museum yang menyajikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan Pekerjaan Umum. Maka alternatif nama museum yang diusulkan adalah:

- c. Museum Sejarah dan Iptek PU.

Dalam proses pembahasan, pilihan **c (Museum Sejarah dan Iptek PU)** belum banyak diperbincangkan, sementara kecenderungan kesepakatan adalah pilihan **b**, yaitu **Museum PU** atau **Museum Pekerjaan Umum**. Pilihan ini dilandasi pertimbangan:

- Istilah PU atau Pekerjaan Umum telah dikenal luas, tak hanya sebagai nama Kementerian, tetapi juga dikenal sebagai identitas suatu lingkup kerja, yaitu bidang kerja ataupun produk yang terkait dengan konstruksi/bangunan untuk kebutuhan publik/umum.
- Istilah Kementerian Pekerjaan Umum dengan sendirinya terkait nomenklatur suatu sektor pemerintahan, yang bisa berubah-ubah sesuai situasi sosial-politik sesaat. Pada kenyataannya, nomenklatur Kementerian/Departemen terkait Pekerjaan Umum pernah beberapa kali berubah, antara lain:
 - Pekerjaan Umum dan Tenaga, atau PUT.
 - Perhubungan, Pekerjaan Umum, dan Tenaga, atau PPUT.
 - Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, atau PUTL.
 - Pekerjaan Umum, atau PU.
 - Pemukiman dan Prasarana Wilayah, atau Kimpraswil.
 - Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, atau PU-Pera.

Atas pertimbangan tersebut, identitas museum disepakati agar tidak dikaitkan dengan nomenklatur Kementerian (organisasi pemerintahan) namun memuat pengertian yang lebih mendasar, yaitu Pekerjaan Umum.

Terdapat contoh kasus yang menimbulkan permasalahan dalam pengelolaan museum jika dikaitkan dengan nomenklatur Kementerian, antaranya pada Museum Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata di Bali, yang kemudian mengalami masalah dalam pengelolaannya, ketika Kementerian tersebut dipecah, menjadi: (a) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan (b) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Perlu dipertimbangkan bahwa umumnya museum adalah lembaga yang berusia panjang, sehingga pertimbangan strategis jangka panjang selalu diperlukan.

Secara historis, penamaan sebagai Museum PU dapat membuka kemungkinan penceritaan yang lebih jauh dan luas, tak hanya sebatas bangunan/konstruksi publik Masa Kolonial (Belanda) dan Masa Republik Indonesia (Serikat), tetapi lebih jauh lagi ke wilayah sejarah-budaya pra-kolonial.

Meski penamaan dan identitasnya tak menyebut langsung istilah Kementerian PU (dan nomenklatur dampingannya), namun Museum PU tetap memiliki hubungan langsung dengan Kementerian PU, karena secara kelembagaan museum ini bernaung di bawah Kementerian PU. Di sisi lain, dalam muatan dan sajiannya, Museum PU dapat pula menampilkan sektor-sektor kegiatan yang selama ini pernah bersama-sama mengisi peran dan bakti bidang ini terhadap kehidupan bangsa dan negara, antaranya: bidang-bidang Perhubungan, Tenaga (Listrik), Perumahan Rakyat, dll. Pengertian Pekerjaan Umum dalam terminologi Museum PU dapat dikembangkan seluas-luasnya, sejauh masih relevan, tanpa perlu terikat dengan pengertian dasar tentang *Burgerlijke Openbare Werken (Civil Publik Works)*.

Museum dapat diartikan sebagai sarana penggambaran secara visual perjalanan sejarah dan peradaban bangsa, khususnya karya-karya *master piece* pekerjaan umum dari masa ke masa: masa lalu, masa kini, dan cita-cita atau impian masa yang akan datang. Sehingga dapat memberikan gambaran tentang ide-ide besar mewujudkan kesejahteraan bangsa Indonesia.

Perlu diperhatikan bahwa dalam tradisi permuseuman, lembaga museum umumnya memiliki hubungan erat dengan dunia keilmuan/akademik. Karenanya, lingkup identitas Museum PU akan banyak terpengaruh pula oleh perkembangan dunia akademik. Secara tradisional, bidang Pekerjaan Umum akan dikaitkan dengan bidang Teknik Sipil (*Civil Engineering*) serta bidang-bidang teknik terkait. Namun tumbuhnya kajian dan kerja di bidang Kesehatan Lingkungan, sebagai contoh, yang di dunia akademik kadang ditempatkan di wilayah Kesehatan Masyarakat —selain di bidang Teknik Lingkungan—berakibat perlunya keterbukaan serta perluasan wawasan maupun relasi Museum PU dalam membangun hubungan dengan dunia keilmuan.

Pada akhirnya, pemaknaan terhadap terminologi Pekerjaan Umum yang terkandung dalam pengertian Museum PU, akan ditentukan oleh hubungan antara Museum PU dengan masyarakat. Di masa depan, makna PU bagi

masyarakat, adalah makna Pekerjaan Umum sebagaimana dikembangkan oleh Museum PU sendiri.

Sejalan dengan pemaknaan tersebut, maka Museum PU juga dapat berperan penting dalam membangun opini masyarakat tentang Pekerjaan Umum. Sampai saat ini masih ada sebagian masyarakat yang secara totalitas berpendapat bahwa produk-produk konstruksi publik yang dihasilkan oleh pemerintah kolonial Belanda, memiliki kualitas yang lebih baik dari produk konstruksi publik karya bangsa Indonesia. Museum PU perlu menjadi sumber informasi yang lebih berimbang dan sekaligus membangun rasa bangga terhadap karya bangsa, khususnya di bidang Pekerjaan Umum.

5.2. Program Kerja

Sasaran program kerja dalam kerangka pengelolaan Museum PU pada pokoknya akan menyangkut tiga hal, yaitu:

- a. Koleksi
- b. Informasi
- c. Publik

Secara lebih rinci, sasaran program kerja yang akan dilakukan adalah:

1. Pengumpulan koleksi yang merupakan bukti fisik (artefak) sejarah-budaya tentang bidang kerja maupun produk hasil kerja Pekerjaan Umum di Indonesia;
2. Pendokumentasian berbagai bukti fisik (artefak) sejarah-budaya tentang bidang kerja maupun produk hasil kerja Pekerjaan Umum di Indonesia;
3. Pemeliharaan dan konservasi (pengawetan) koleksi yang merupakan bukti fisik sejarah-budaya tentang bidang kerja maupun produk hasil kerja Pekerjaan Umum di Indonesia;
4. Pengelolaan koleksi yang merupakan bukti fisik (artefak) sejarah-budaya tentang bidang kerja maupun produk hasil kerja Pekerjaan

- Umum di Indonesia, mencakup kegiatan inventarisasi, katalogisasi, dan pembuatan basis-data;
5. Pelaksanaan kajian terhadap koleksi yang merupakan bukti fisik (artefak) sejarah-budaya tentang bidang kerja maupun produk hasil kerja Pekerjaan Umum di Indonesia, menyangkut aspek pelestarian maupun informasi;
 6. Perolehan dan pengungkapan informasi kandungan koleksi Museum PU, sebagai bukti fisik sejarah-budaya bidang Pekerjaan Umum di Indonesia;
 7. Pengumpulan materi informasi tentang Pekerjaan Umum di Indonesia, baik berupa materi tekstual, visual, maupun audio-visual;
 8. Penyimpanan dan pelestarian berbagai materi informasi tentang Pekerjaan Umum di Indonesia, baik berupa materi tekstual, visual, maupun audio-visual, yang diselenggarakan dalam kerangka kerja kearsipan dan perpustakaan;
 9. Pelaksanaan kajian dan pengolahan materi informasi tentang Pekerjaan Umum di Indonesia, baik proses kerja maupun produk hasil kerjanya;
 10. Penyajian Koleksi dan Informasi kepada pengunjung museum, dalam kerangka Pameran Tetap Museum PU, dengan penguatan aspek kognitif maupun afektif, termasuk di dalamnya sejarah Kementerian PU serta sejarah perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang merupakan karya-karya unggulan dari jajaran PU beserta Mitra Kerjanya;
 11. Pengembangan program interaktif dalam kerangka Pameran Tetap Museum PU, dengan penguatan aspek kognitif, afektif, maupun psiko-motorik;
 12. Penyelenggaraan Pameran Temporer dan Pameran Keliling untuk penguatan dan peningkatan apresiasi publik terhadap bidang PU maupun Museum PU;
 13. Penyebar-luasan informasi tentang Pekerjaan Umum di Indonesia kepada masyarakat luas, melalui publikasi cetak, elektronik, maupun media internet;

14. Pengembangan aneka program publik dengan muatan informatif tentang Pekerjaan Umum di Indonesia;
15. Pelaksanaan kegiatan "*technical laboratorium*" yang disediakan oleh museum dan berguna bagi dunia pendidikan dan masyarakat luas, dalam kepentingan mencerdaskan bangsa;
16. Perwujudan fasilitas fisik sebagai wadah interaksi dan komunikasi antara Kementerian Pekerjaan Umum dengan masyarakat luas, khususnya para wisatawan;
17. Perwujudan diplomasi budaya baik untuk kepentingan dalam negeri maupun luar negeri.

5.3. Kerangka Dasar Museum PU

5.3.1. Lokasi

Museum didirikan dengan memanfaatkan bangunan Gedung Heritage, direncanakan berlokasi di Lantai II, yang terdapat dalam lingkungan perkantoran Kementerian Pekerjaan Umum. Selain itu direncanakan pula untuk memanfaatkan sebagian area pertamanan sebagai area pameran luar ruang (*outdoor exhibition*). Aset ini telah dikuasai dan dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, dengan Alamat Jalan Pattimura, Jakarta Selatan.

Gedung *Heritage* adalah bangunan lama yang sengaja dilestarikan. Di lokasi ini juga terdapat ruang bersejarah (*historical/memorial room*) yang pernah digunakan oleh beberapa orang Menteri PU dari beberapa masa Kementerian. Dalam suatu museum, kebutuhan ruang sedikitnya akan mencakup:

1. Ruang Studi dan Ruang Penyimpanan (*Storage*) + Laboratorium Konservasi,
2. Ruang Pameran Tetap – dalam ruang (*indoor exhibition*),
3. Ruang Pameran Tetap – luar ruang (*outdoor exhibition*),
4. Ruang Pameran Temporer,
5. Ruang Layanan Publik (auditorium, perpustakaan, Arena Anak, dll.),

6. Ruang Serbaguna (untuk kebutuhan seminar, loka-karya, bedah-buku dsb.),
7. Ruang Kerja Teknis: kuratorial, publikasi, edukasi, dll,
8. Ruang Kantor, Ruang Rapat, dan Administrasi.

Melalui observasi sepintas, tampaknya ruang yang tersedia tak cukup memenuhi kebutuhan ruang sesuai bakuan dasar, meski besaran ruang untuk setiap museum relatif berbeda-beda, dan sejatinya besar ruang tidak sepenuhnya memengaruhi kualitas sajian dan program suatu museum. Jika dalam proses kajian keruangan disimpulkan bahwa kebutuhan ruang ternyata memerlukan penambahan area, diharapkan bahwa bagian-bagian lain dari Gedung Heritage dapat dimanfaatkan pula untuk kebutuhan Museum PU.

5.3.2. Konsep Arsitektur dan Program Ruang

Tinjauan Gedung Heritage PU

Dilantiknya Ir. Sutami sebagai Menteri PUT mendorong percepatan dalam bidang pembangunan fisik, termasuk membangun kantor kementerian PUT di Jl. Pattimura, Jakarta. Yang berjasa dalam pembangunan ini adalah Ir. Sutami dari Utama Karya, dan Ir. Hatmadi Pinandjoyo dari Bina Karya. Berdasar penuturan saksi sejarah Dr. (Ark.) Djauhari Soemintardja, 2013, gedung Heritage PU merupakan:

- Gedung perintis kawasan perkantoran di wilayah Blok M, yang sedianya untuk permukiman,
- Aset Arsitektur Indonesia di masa 4 Windu Merdeka yang menonjolkan atap "khas" Indonesia yang berbentuk limasan (Kompendium Sejarah Arsitektur, 1978: 135). Akan tetapi bentuk itu kini sudah berubah,
- Gedung ini dirancang bertahap yaitu: rancangan asli 4 *trave* untuk 2 lantai, dalam waktu 3 tahun, gedung menjadi seperti eksisting.



Gambar: Gedung Heritage PU

Tinjauan Kampus PU Masa Depan

Ditujukan menjadi *Platinum Green Building* dengan komposisi sbb:

Luas Total:	5,3846 Ha
Luas Ruang Terbangun:	18.243,64 m ² (33,88 %)
Luas Ruang Terbuka (dg. perkerasan):	17.541,20 m ² (32,58 %)
Luas Ruang Hijau:	18.061,16 m ² (33,54 %)



Gambar: Master Plan Kampus PU, (Sumber: Arkonin, 2013)

LEGENDA :

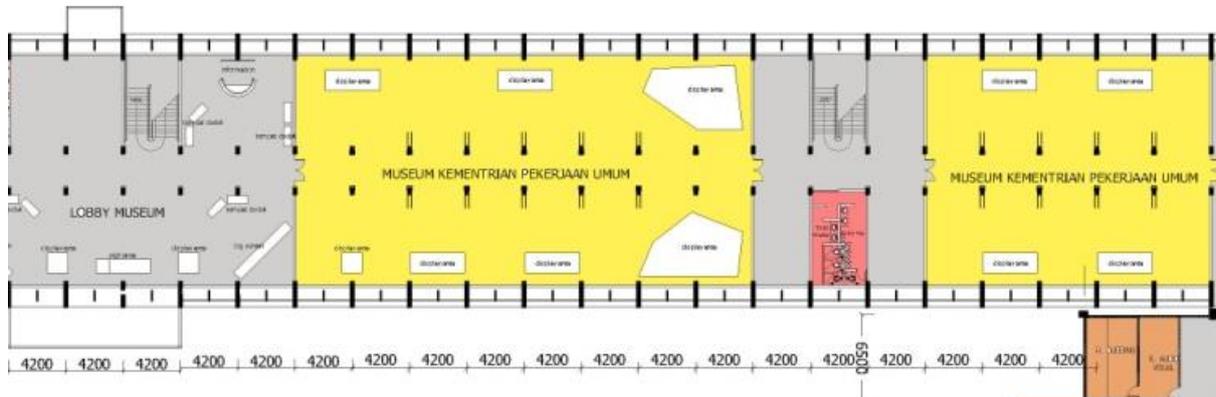
A. GEDUNG UTAMA DAN FASILITAS PENUNJANG KAMPUS PU	17 lantai
B. GEDUNG CIPTA KARYA – BINA MARGA	8 lantai
C. GEDUNG SDA	
D. GEDUNG PENATAAN RUANG DAN FASILITAS PENUNJANG KAMPUS PU	
E. GEDUNG HERITAGE, PUSDATA - PUSKOMPU	4 lantai 5 lantai
F. MASJID	

Merujuk *MasterPlan* Kampus PU 2013, Lokasi Museum PU sudah disinggung dan ditempatkan pada area LT2 gedung Heritage PU seluas 2.856.000 m² dengan perincian ruang sbb:

No.	Ruang	Luas
1.	Area Museum	185,85 m ²
2.	Kantor Pengelola Museum	130,20 m ²
3.	Ruang Penyimpanan & Ruang Sortir	387,10 m ²
4.	TPA	109,60 m ²
5.	Ruang Penunjang:	
	• Toilet	126,80 m ²
	• Pantry	5,00 m ²
	• Janitor	3,00 m ²
	• Ruang Laktasi	4,00 m ²
	• Sirkulasi 25%	714,00 m ²
TOTAL		2.856,00 m²

Bila merujuk idealnya sebuah pendirian museum baru yaitu sekitar 4.000 m², maka masih diperlukan lagi sekitar 1.144,00m². Kebutuhan tersebut dapat dipecahkan dengan merancang museum outdoor dengan cara mengoptimalkan area hijau Kampus PU yaitu menjadi bagian dari Ruang Terbuka (dengan perkerasan) yang memiliki luas 17.541,20 m² (32,58 %), namun dengan pemilihan lokasi yang sedemikian sehingga terjadi integrasi antara museum koleksi indoor dan outdoor-nya.

Lokasi Museum di Gedung Heritage PU



Gambar: Lokasi Museum PU di Lantai 2 Gedung Heritage PU
(Sumber: Binakarya, 2013)



Gambar: Lokasi Museum PU sebagai Bagian dari Ruang-ruang Lain di Gedung Heritage PU
(Sumber: Binakarya, 2013)



Gambar: Suasana Lobby Gedung Heritage PU menuju Museum PU di Lantai 2
(Sumber: Binakarya, 2013)



Gambar: Gedung Heritage PU di Masa Mendatang
(Sumber: Bina Karya, 2013)

5.3.3. Materi dan Koleksi

Landasan penetapan materi serta batasan penetapannya dilakukan dalam kerangka berikut.

- Landasan keilmuan untuk pemahaman objek mencakup namun tidak terbatas pada bidang-bidang ilmu: Teknik Sipil, Teknik Elektro, Planologi, Arsitektur, Arkeologi, Sejarah, Konservasi Bangunan Bersejarah, dsb.
- Batasan untuk objek infrastruktur publik adalah yang dibangun untuk kepentingan umum. Infrastruktur untuk kepentingan militer, ataupun kepentingan komersial (ekonomi-privat) tidak termasuk dalam objek Museum PU.
- Utamanya mencakup objek di Kementerian PU, namun dapat tercakup juga objek pada Kementerian Perhubungan, Energi, Perumahan, BUMN terkait, ataupun produk sektor swasta yang difungsikan untuk publik.

Bidang garap Museum PU melingkupi:

- Wujud fisik bangunan,
- Proses kerja pembangunan/konstruksi,
- Perangkat dan peralatan kerja Pekerjaan Umum,
- Berbagai dokumen terkait proses dan produk kerja,
- Sejarah-budaya di bidang Pekerjaan Umum,
- Perkembangan budaya dan iptek di bidang PU,
- Tokoh-tokoh PU,
- Aneka koleksi dan informasi terkait PU lainnya.

Rencana kegiatan terkait koleksi adalah:

- Perolehan dan Pengumpulan Koleksi
- Pengelolaan Koleksi
 - Konservasi Koleksi
 - Pendataan, Katalogisasi, basis data
 - Preparasi dan Penyajian

Jenis Koleksi Museum PU akan mencakup:

- Dokumen dan Arsip: surat, gambar, dll.
- Benda bergerak (artefak/relik, dan ekofak)
- Benda tak bergerak (koleksi besar: bulldozer, dump-truk, dll.)
- Benda tak bergerak (fitur in-situ: bangunan publik di berbagai daerah)

5.3.4. Periodisasi Pengisahan

Pembabakan dalam pengisahan di Museum PU telah disepakati akan terbagi menjadi 3 periode, terdiri dari:

1. Masa Kuno

kanal dan bendungan dalam prasasti; bukti arkeologis (kanal Trowulan, Banten); jalan tol masa Mataram; pelabuhan kuno; percandian; dsb.

2. Masa Kolonial

tata-kota Belanda; kanal dan bendungan; terowongan dan rel KA; jalan pos Daendels; jembatan; aneka bangunan Belanda; dsb.

3. Masa Republik Indonesia

bendungan Jatiluhur, Asahan; jembatan Semanggi, Ampera, Suramadu; masjid Istiqlal; jalan-tol Jagorawi, Cipularang; bandara Soetta, dsb.

5.3.5. Rencana Umum Tata Pamer

Secara konseptual, Tata Pamer Tetap Museum PU akan terdiri dari:

- SAJIAN KOLEKSI
 - Koleksi Bergerak (relik)
 - Koleksi Tak-bergerak
- SAJIAN INFORMATIF
 - Cetak
 - Elektronik
 - Audio-visual dan multi-media

- SAJIAN EVOKATIF
 - Ruang bersejarah
 - Maket atau tampilan digital
- SAJIAN INTERAKTIF
 - Permainan
 - Elektronik

5.3.6. Rancangan Program Pendukung

Beberapa bentuk program pendukung yang dapat dilakukan antaranya:

- PUBLIKASI
 - Buku dan buletin
 - Media internet
 - Hubungan media-massa (*media-relations*)
- PROGRAM PUBLIK: Akademisi dan Mahasiswa
 - Seminar dan Diskusi Keilmuan
 - Lomba Karya Ilmiah
 - Acara seni-budaya
- PROGRAM PUBLIK: Pelajar dan Anak-anak
 - Program kunjungan
 - Diskusi bulanan
 - Program khusus untuk KIR Sekolah Menengah
 - Lomba dan Permainan
 - Acara seni-budaya

5.4. Sistem Manajemen Museum PU

Manajemen museum adalah bidang yang sebenarnya bersifat fleksibel dan kondisional. Karena beraneka-ragamnya bentuk, jenis, (induk) pengampu, dan misi museum, manajemennya pun akan menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, khususnya organisasi induk (pengampu).

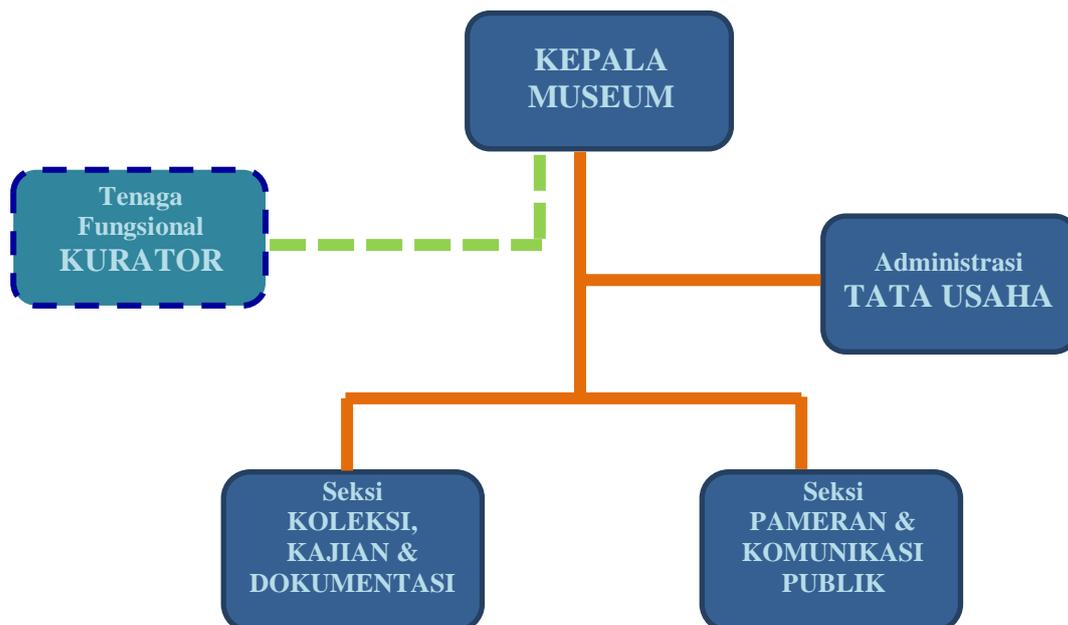
5.4.1. Rencana Organisasi dan Uraian Tugas

Secara umum manajemen museum terdiri dari:

- Pimpinan/Kepala Museum
- Kurator (*tenaga fungsional*)
- Bidang/Seksi Koleksi dan Konservasi
- Bidang/Seksi Pameran, Bimbingan, dan Program Publik
- Bagian Administrasi (TU, sekretariat, keuangan)

Untuk manajemen Museum PU, disarankan agar format organisasinya berupa Unit Pelaksana Teknis (UPT), sehingga akan menjadi UPT Museum PU. Sesuai bidang kerja museum yang mencakup: pelestarian, kajian, dan komunikasi publik, UPT Museum PU dapat bernaung di bawah Pusat Komunikasi Publik, Kementerian PU. Alternatif lain, ditempatkan pada Pusat Pengolahan Data, Pusat Kajian Strategis, atau di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan. Sesuai besaran cakupan kerjanya, Pimpinan UPT Museum PU ini disarankan pada tingkatan eselon III.

BAGAN ORGANISASI MUSEUM PU - sederhana



URAIAN TUGAS

1. Kepala Museum

Penanggung-jawab keseluruhan fungsi museum.

Tugas:

- Koordinasi pengelolaan harian dan administrasi
- Koordinasi fungsi-fungsi utama museum
- Koordinasi seluruh program dan kegiatan

2. Kepala Seksi Koleksi, Kajian, dan Dokumentasi

Penanggung-jawab keseluruhan tugas pelestarian.

Tugas:

- Pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan koleksi
- Pelaksanaan perlindungan dan konservasi koleksi
- Pelaksanaan kajian koleksi, kajian materi, dan kajian publik
- Pelaksanaan program dokumentasi koleksi dan materi *in-situ*

3. Kepala Seksi Pameran dan Komunikasi Publik

Penanggung-jawab keseluruhan tugas komunikasi publik

Tugas:

- Pelaksanaan pekerjaan pameran: tetap, temporer, keliling
- Pelaksanaan kegiatan bimbingan dan edukasi
- Pelaksanaan kegiatan publikasi: cetak, elektronik, audio-visual, internet
- Pelaksanaan program publik: seminar, program interaktif, permainan, dsb.

4. Kepala Seksi Tata-Usaha

Penanggung-jawab keuangan dan keseluruhan tugas administrasi

Tugas:

- Pelaksanaan penyusunan program kerja dan evaluasi program
- Pelaksanaan kegiatan rutin administratif dan sekretariat
- Pelaksanaan pekerjaan keuangan
- Pelaksanaan kegiatan umum dan personalia

5. Kurator (tenaga fungsional)

Penanggung-jawab muatan dan sajian

Tugas:

- Dukungan dan arahan pelaksanaan pengelolaan koleksi dan dokumentasi materi *in-situ*
- Dukungan dan arahan pelaksanaan kajian koleksi, kajian materi, dan kajian publik
- Dukungan dan arahan pelaksanaan pameran, publikasi, dan program publik

CATATAN:

Kurator dapat diangkat dari:

- Tenaga fungsional di Badan, Pusat, atau UPT di lingkungan PU
- Tenaga kontraktual (*outsourcing*), sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan

5.4.2. Strategi Pendanaan

Sumber pendanaan museum masih menjadi masalah yang serius dan menjadi perhatian para anggota ICOM (*The Internal Council of Museum*). Di Indonesia banyak lembaga museum baik yang dikelola swasta maupun pemerintah masih belum sesuai dengan kriteria ICOM. Sebenarnya para pengelola museum telah mengetahui bagaimana cara mengelola secara proporsional, namun terpaksa tidak dilakukan karena terbentur masalah dana. Untuk mengelola museum memang diperlukan dana yang tidak kecil. Apalagi ICOM mengamanatkan lembaga museum tidak berorientasi profit atau keuntungan finansial. Masalah inilah antara lain yang membuat museum tidak berkembang sehingga kurang diminati masyarakat.

Alternatif pendanaan:

- a. Alternatif 1, dana untuk Museum Pekerjaan Umum adalah dari APBN.
- b. Alternatif 2, Museum PU dikelola oleh Yayasan.

Jalan keluar dari tingginya pendanaan museum, adalah dengan membentuk Yayasan. Artinya museum dikelola yayasan bukan dibawah pemerintah, dengan demikian pengelola dapat membuka keran pendanaan.

Pengelola dapat melibatkan masyarakat untuk mengembangkan museum. Namun dengan masuknya dana dari luar memiliki konsekuensi yang tidak sederhana. Pengelola harus berani terbuka atau transparan terhadap publik khususnya masalah keuangan. Dana yang diterima berstatus hibah, sumber bisa perorangan maupun perusahaan. Museum akan menjadi ruang publik yang benar-benar akuntabel dan transparan.

Meskipun demikian, baik sumber dana yang ditetapkan misalnya dari alternatif 1, yaitu dari APBN, pengelola juga tetap harus membuat laporan-laporan keuangan secara detail untuk diserahkan kepada lembaga-lembaga audit seperti BPK bahkan KPK. Pengelola juga harus memiliki visi dan misi yang dijabarkan dalam program yang jelas. Salah satu syarat yang ditetapkan ICOM adalah museum memiliki program yang berkesinambungan. Program-program tersebut diharapkan dapat menepis kesan museum yang hanya berfungsi sebagai gudang penyimpanan barang-barang bersejarah saja.

5.4.3. Strategi Pelaksanaan

Strategi Jangka Pendek 2014 – 2015

Targetnya adalah terbentuknya rancangan fisik atau desain tata pameran berdasar lokasi yang dipersiapkan menjadi museum PU beserta calon koleksi museum melalui:

- a. Pembentukan Manajemen Museum PU
- b. Perekrutan Tim Tata Pameran di bawah Manajemen Museum
Terdiri atas Perancang *Story Line*, Kurator, Tim Pengadaan Koleksi, Desainer Interior & Lighting Specialis, Seniman/Pelukis dan Desainer Grafis, Tim IT.

Strategi Jangka Menengah 2015-2020

Targetnya adalah pembukaan Museum PU, tersosialisasi secara nasional dan menjadi Jejaring Museum Dunia melalui:

- a. Mendatangkan koleksi dari berbagai bidang serta mem-preservasinya
- b. Menyimpan koleksi dalam satu wadah tertentu untuk direpair
- c. Persiapan Kuratorial benda pameran oleh Kurator Utama dan persiapan Caption Koleksi
- d. Persiapan fisik/setting up Tata Pamer *indoor* dan *outdoor*
- e. Set up sistem Lighting dan IT
- f. Uji coba atas rancangan secara ter-integrasi

Strategi Jangka Panjang 2020-2025

Targetnya adalah kemandirian Museum PU yang dapat membiayai kehidupannya sendiri.

5.4.3. Tahapan dan Kerangka Kerja

Tahap Kerja dalam rangka pendirian Museum PU dibagi dalam 3 Tahapan:

- 1.** Persiapan
- 2.** Kajian, Perencanaan, dan Rancangan
- 3.** Pelaksanaan

Keseluruhan tahapan kerja ini diperkirakan memerlukan waktu kerja selama 2 tahun berturut-turut. Bagian-bagian tahapan kerja tidak seluruhnya berjalan serial berurutan, namun ada beberapa bagian yang akan dilakukan secara paralel (bersamaan).

Kerangka kerja disusun menjadi 5 kelompok kegiatan:

- ORGANISASI dan KELEMBAGAAN
 - Pembentukan UPT Museum PU
 - Penetapan Personalia
 - Penunjukan Kurator
 - Administrasi
 - Peresmian Museum PU

- KAJIAN
 - Kajian Keruangan
 - Kajian Koleksi
 - Kajian Materi
 - Kajian Komunikasi Publik
 - Kajian Muatan

- PERENCANAAN
 - Perencanaan Muatan
 - Penyusunan Alur Sajian (*Story-Line*)
 - Perencanaan Tata Pamer
 - Perencanaan Interior

- RANCANGAN
 - Rancangan Sajian Koleksi
 - Rancangan Sajian Informatif
 - Rancangan Sajian Evokatif
 - Rancangan Sajian Interaktif
 - Rancangan Sajian Estetis

- PENGADAAN BARANG dan JASA
 - Pengadaan Dan Pengumpulan Koleksi
 - Pengadaan Materi Informatif
 - Pengadaan Sajian Evokatif
 - Pengadaan Perangkat Pameran
 - Pelaksanaan Konstruksi Interior
 - Jasa Penataan

Tahapan dan Kerangka Kerja tersebut dapat digambarkan secara skematik sebagai berikut.



BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

1. Secara konseptual, telah diperoleh beberapa hasil kegiatan, yaitu:
 - a. Penetapan alternatif nama museum
 - b. Penetapan cakupan bidang dan periodisasi pengisahan
 - c. Perolehan gambaran tentang program ruang
 - d. Perolehan gambaran sistem manajemen kerja Museum PU
 - e. Perolehan gambaran untuk langkah-lanjutan dan strategi pelaksanaan.

2. Secara konseptual, teknis, maupun secara administratif, kegiatan Sistem Manajemen Museum Kementerian PU telah dapat mencapai tujuan kegiatannya.

3. Proses pendirian Museum PU perlu didahului suatu proses awal, yaitu:
 - KELEMBAGAAN: Pembentukan Pra-Museum PU
 - Fungsi: pengumpulan koleksi, penyiapan ruang
 - Masa fungsi: sampai pembentukan/peresmian Museum PU
 - PERSONALIA: Pembentukan Tim Ad-hoc Pendirian Museum PU
 - Tugas: pengelolaan Pra-Museum PU, penyiapan kelembagaan
 - Masa tugas: sampai lembaga UPT Museum PU terbentuk

6.2. Rekomendasi

1. Perlu dipertimbangkan untuk menyediakan ruangan yang lebih besar yang akan digunakan sebagai Museum PU.
 - Optimal: menggunakan seluruh gedung Heritage
 - Alternatif: menambahkan 1-2 lantai sebagai area museum
2. Administrasi, perlu pengalokasian anggaran belanja untuk biaya operasional untuk kegiatan sehari-hari museum.
3. Dibentuk suatu kelembagaan pengelolaan museum yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan.